

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, IPM, KEMISKINAN DAN JUMLAH PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Ramania Sthefany Rolenta Parhusip¹⁾, Raina Linda Sari²⁾, Irsad Lubis³⁾

Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3)}

ramaniarolenta.parhusip@gmail.com

ABSTRAK

Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menimbulkan berbagai argumen mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta pengaruh jumlah pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2019–2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan Model Fixed Effect sebagai model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien sebesar -0,614852 dengan nilai probabilitas 0,2179 ($>0,05$) yang dapat diartikan bahwa peningkatan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun arah koefisiennya negatif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki koefisien sebesar 3,615931 dengan nilai probabilitas 0,0000 ($<0,05$) yang menunjukkan bahwa peningkatan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan memiliki koefisien sebesar -19,29937 dengan nilai probabilitas 0,0000 ($<0,05$) yang berarti bahwa peningkatan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah pengangguran memiliki koefisien sebesar -0,963516 dengan nilai probabilitas 0,0257 ($<0,05$) yang menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasinya, pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara perlu memprioritaskan kebijakan peningkatan kualitas SDM (IPM) serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran melalui penguatan layanan dasar dan penciptaan kerja produktif, disertai perbaikan efektivitas pemanfaatan PAD agar lebih berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Keywords (Kata Kunci) : IPM, Kemiskinan, Pendapatan Asli Daerah, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi daerah merefleksikan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan output barang dan jasa secara berkelanjutan serta menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Namun, capaian pertumbuhan tidak selalu berjalan seiring dengan perbaikan kualitas hidup secara merata, terutama pada wilayah dengan heterogenitas karakteristik sosial-ekonomi dan kapasitas fiskal antardaerah (Daulay, 2020). Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, perbedaan struktur ekonomi, tingkat urbanisasi, kualitas layanan publik, dan kapasitas kelembagaan antar kabupaten/kota berpotensi menimbulkan variasi performa pertumbuhan sekaligus ketimpangan kesejahteraan.

Periode 2019–2023 merupakan fase yang krusial karena mencakup transisi krisis dan pemulihan pascapandemi, ketika pemerintah daerah menghadapi tekanan ganda: menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan perlindungan sosial dan layanan dasar. Pada fase ini, efektivitas manajemen fiskal daerah menjadi penentu penting—bukan hanya seberapa besar penerimaan daerah, tetapi juga seberapa tepat alokasi dan kualitas belanja publik dalam

mendorong aktivitas ekonomi produktif dan pemulihan yang inklusif. Dengan demikian, analisis pertumbuhan ekonomi daerah perlu ditempatkan pada kerangka tata kelola dan kebijakan publik, khususnya dalam menilai sejauh mana kapasitas fiskal dan indikator pembangunan manusia berinteraksi dengan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran.

Salah satu instrumen utama dalam kapasitas fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi sumber pembiayaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sering dipandang sebagai indikator kemandirian fiskal (Ahya, 2021). Secara teoritis, PAD dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsi utama keuangan publik, yaitu fungsi alokasi (penyediaan layanan publik), fungsi distribusi (pengurangan ketimpangan dan kemiskinan), serta fungsi stabilisasi (menjaga kestabilan ekonomi) (Musgrave, 1959). Namun dalam praktiknya, kenaikan PAD tidak otomatis meningkatkan pertumbuhan apabila tidak diikuti oleh kualitas pengelolaan anggaran, efisiensi belanja, dan ketepatan sasaran program pembangunan. Situasi pascapandemi semakin menekankan pentingnya dimensi public management, sebab

banyak daerah mengalokasikan anggaran untuk respons krisis, sehingga efeknya pada ekspansi ekonomi produktif bisa tertunda atau tidak langsung terlihat.

Selain kapasitas fiskal, kualitas pembangunan manusia merupakan faktor yang menentukan daya saing dan produktivitas wilayah. UNDP menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator inti untuk menilai kemajuan pembangunan melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Secara konseptual, pembangunan manusia berperan sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang karena meningkatkan kualitas tenaga kerja dan kapasitas produktif masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Di Provinsi Sumatera Utara, tren IPM cenderung meningkat, tetapi peningkatan tersebut belum tentu mencerminkan pemerataan kualitas hidup antardaerah. Masih terdapat kabupaten/kota dengan IPM relatif rendah sekalipun aktivitas ekonomi menunjukkan perbaikan. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan dapat terjadi tanpa sepenuhnya menurunkan kerentanan sosial, terutama jika tidak disertai peningkatan akses layanan dasar, kesempatan kerja, dan kualitas sumber daya manusia.

Persoalan kemiskinan dan pengangguran menjadi tantangan struktural yang secara langsung berkaitan dengan kinerja ekonomi daerah. Dalam pendekatan kapabilitas, kemajuan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk keluar dari perangkap kemiskinan dan memperluas akses terhadap peluang hidup yang lebih baik (Sen, 1990). Sementara itu, teori modal manusia menegaskan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan meningkatkan produktivitas serta pendapatan, sehingga memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga dan menurunkan kemiskinan (Becker, 1953). Namun pada periode pascapandemi, tekanan pasar kerja dan pemulihan yang tidak merata dapat memperbesar risiko kemiskinan dan menekan daya beli, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara empiris, sejumlah penelitian telah menguji determinan pertumbuhan ekonomi dan indikator sosial-fiskal di berbagai wilayah. Darnawaty dan Purnamasari (2019) menunjukkan bahwa PDRB dan pendidikan berpengaruh terhadap IPM. Marita Damanik (2022) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemiskinan berpengaruh signifikan. Ahmad Kholis Nasution (2022) mengemukakan bahwa IPM dan pengangguran memengaruhi kemiskinan melalui pendekatan panel ARDL. Yuliadi (2020) menegaskan bahwa IPM serta belanja birokrasi berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi. Walaupun demikian, temuan-temuan tersebut masih menyisakan ruang penguatan analisis, terutama

ketika penelitian diarahkan untuk menjelaskan dinamika pascapandemi dan konteks tata kelola daerah.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (research gap). Pertama, banyak studi menilai faktor fiskal dan sosial secara parsial, sehingga hubungan terintegrasi antara PAD, IPM, kemiskinan, dan pengangguran dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi daerah belum tergambar utuh. Kedua, terdapat inkonsistensi hasil terkait pengaruh PAD terhadap pertumbuhan—sebagian studi menemukan pengaruh positif tidak signifikan, sementara kajian lain menunjukkan variasi kesimpulan—yang mengindikasikan perlunya pembacaan dari sisi efektivitas kebijakan dan kualitas tata kelola fiskal daerah. Ketiga, sebagian penelitian menggunakan pendekatan yang belum sepenuhnya menangkap heterogenitas antarkabupaten/kota, padahal perbedaan karakteristik wilayah di Sumatera Utara dapat memengaruhi respons pertumbuhan terhadap variabel fiskal dan sosial. Keempat, penelitian yang secara spesifik menguji pengaruh PAD, IPM, kemiskinan, dan pengangguran secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2019–2023 masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan jumlah pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2019–2023 dengan menggunakan pendekatan data panel Fixed Effect Model (FEM). Pemilihan metode ini memungkinkan penelitian menangkap karakteristik spesifik masing-masing daerah yang tidak teramati, sehingga estimasi hubungan antarvariabel menjadi lebih akurat.

Kontribusi penelitian ini tidak hanya pada pengujian kembali determinan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga pada penguatan perspektif kebijakan publik melalui integrasi variabel fiskal dan sosial dalam satu model serta penyajian gambaran empiris mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi daerah pascapandemi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan masukan yang lebih relevan bagi pemerintah daerah di Sumatera Utara dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas belanja publik, penguatan pembangunan manusia, serta penanganan kemiskinan dan pengangguran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan jumlah

pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Metode data panel dipilih karena mengombinasikan dimensi lintas wilayah (cross-section) dan lintas waktu (time-series), sehingga mampu menangkap perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota sekaligus dinamika perubahan antarperiode. Selain meningkatkan derajat kebebasan (degree of freedom) dan efisiensi estimasi, pendekatan ini juga relevan untuk konteks Sumatera Utara yang memiliki heterogenitas pembangunan, kapasitas fiskal, dan kondisi sosial-ekonomi antarwilayah.

Periode pengamatan 2019–2023 dipilih karena merupakan fase kritis yang mencakup transisi pra-krisis, krisis, dan pemulihan pascapandemi, ketika pemerintah daerah menghadapi tantangan public management dalam mengelola pendapatan dan belanja publik, menjaga layanan dasar, serta menekan dampak sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Dalam periode ini, kenaikan atau penurunan PAD, perubahan IPM, serta fluktuasi kemiskinan dan pengangguran tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi, tetapi juga mencerminkan respons kebijakan daerah dan efektivitas tata kelola fiskal dalam situasi krisis dan pemulihan.

Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2019–2023 yang diperoleh dari publikasi resmi instansi terkait (misalnya BPS untuk pertumbuhan ekonomi/PDRB, IPM, kemiskinan, dan pengangguran; serta sumber fiskal pemerintah seperti DJPK/Kementerian Keuangan atau BPKAD untuk PAD). Seluruh data disusun dalam format panel dan diolah menggunakan EViews 12.

Dalam menentukan model estimasi yang paling tepat, penelitian ini melakukan prosedur pemilihan model data panel melalui: (1) uji Chow untuk membandingkan Common Effect Model dan Fixed Effect Model; (2) uji Hausman untuk memilih antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model; serta (3) uji pendukung bila diperlukan (misalnya uji Lagrange Multiplier) untuk memastikan kesesuaian struktur model. Model terbaik kemudian digunakan untuk mengestimasi pengaruh PAD, IPM, kemiskinan, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi, disertai evaluasi signifikansi statistik dan interpretasi kebijakan berdasarkan konteks sosial-ekonomi Sumatera Utara pada periode transisi pandemi–pascapandemi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi data panel pada penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel fiskal dan social PAD, IPM, kemiskinan, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan panel dipilih karena mampu menangkap heterogenitas antarwilayah (misalnya perbedaan

struktur ekonomi, kapasitas fiskal, kualitas layanan publik, dan karakteristik kelembagaan) sekaligus dinamika perubahan antarwaktu. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui pengujian Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

A. Pemilihan Model

Uji Chow (CEM vs FEM)

Tabel 4. 2 Hasil Estimasi Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.918507	(32,128)	0.0058
Cross-section Chi-square	64.645329	32	0.0006

Sumber : Data diolah menggunakan E-views 12

Berdasarkan uji Chow, nilai Cross-section F = 1,918507 (Prob. 0,0058) dan Cross-section Chi-square = 64,645329 (Prob. 0,0006). Karena kedua probabilitas < 0,05, maka H_0 ditolak, sehingga FEM lebih tepat dibanding CEM. Hasil ini menegaskan adanya perbedaan karakteristik yang signifikan antar kabupaten/kota (cross-section heterogeneity) yang tidak dapat diabaikan apabila menggunakan model pooled.

Uji Hausman (FEM vs REM)

Tabel 4. 3 Hasil Estimasi Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	55.954286	4	0.0000

Sumber : Data diolah menggunakan E-views 12

Selanjutnya, uji Hausman menghasilkan Chi-Square = 55,954286 (df = 4) dengan Prob. 0,0000. Karena nilai probabilitas < 0,05, maka H_0 ditolak dan model yang lebih tepat adalah FEM. Secara ekonometrik, temuan ini mengindikasikan bahwa efek individual (karakteristik khusus kabupaten/kota) berkorelasi dengan variabel independen, sehingga REM berpotensi menghasilkan estimasi yang tidak konsisten. Dengan demikian, FEM ditetapkan sebagai model estimasi utama.

B. Uji Diagnostik Model

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 4 Hasil Estimasi Uji Multikolinearitas

	LOG(PAD)	IPM	LOG(KM)	LOG(PG)
LOG(P...	1.000000	0.570179	0.370108	0.756800
IPM	0.570179	1.000000	0.539683	0.484179
LOG(KM)	0.370108	0.539683	1.000000	0.347566
LOG(PG)	0.756800	0.484179	0.347566	1.000000

Sumber : Data diolah menggunakan E-views 12

Uji multikolinearitas dilakukan melalui matriks korelasi antarvariabel independen. Model dinilai aman apabila koefisien korelasi tidak melebihi 0,80. Hasil menunjukkan seluruh korelasi

berada di bawah 0,80; korelasi tertinggi terdapat pada LOG(PAD) dengan LOG(Pengangguran) sebesar 0,756800, namun masih dalam batas toleransi. Ini berarti tidak terdapat multikolinearitas serius, sehingga koefisien regresi relatif stabil dan dapat diinterpretasikan.

Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Tabel 4. 5 Hasil Estimasi Uji Heteroskedastisitas

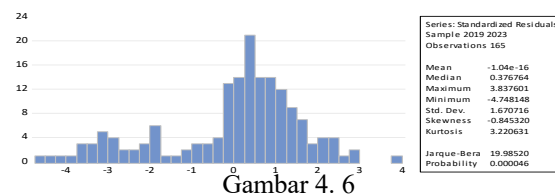
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	69.99217	12.53040	5.585790	0.0000
LOG(PAD)	0.263573	0.286016	0.921532	0.3585
IPM	-0.168292	0.325146	-0.517590	0.6056
LOG(KM)	-5.001628	2.387682	-2.094763	0.0382
LOG(PG)	0.430943	0.245915	1.752405	0.0821

Sumber : Data diolah menggunakan E-views 12

Pengujian Glejser menunjukkan Probabilitas LOG(PAD) = 0,3585, IPM = 0,6056, dan LOG(Pengangguran) = 0,0821 (seluruhnya > 0,05), sehingga tidak terindikasi heteroskedastisitas pada ketiga variabel tersebut. Namun LOG(Kemiskinan) memiliki Prob. 0,0382 (< 0,05) yang mengindikasikan heteroskedastisitas parsial. Artinya, variasi residual cenderung berubah mengikuti tingkat kemiskinan.

Implikasi metodologis: agar inferensi (uji-t dan uji-F) lebih reliabel, model sebaiknya dilaporkan menggunakan robust standard errors (misalnya White/heteroskedasticity-consistent) pada output FEM.

uji normalitas



Gambar 4. 6
Hasil Uji Normalitas

Uji Jarque-Bera menghasilkan JB = 19,98520 dengan Prob. 0,000046 (< 0,05), sehingga residual tidak berdistribusi normal. Pada penelitian panel dengan jumlah observasi memadai, ketidaknormalan residual tidak selalu membatalkan konsistensi estimasi, namun dapat memengaruhi ketepatan inferensi jika asumsi lain tidak diperkuat. Karena itu, penggunaan robust standard errors juga menjadi langkah yang tepat untuk memperkuat validitas pengujian statistik.

C. Uji Hipotesis dan Kelayakan Model

Uji T

Setelah melakukan Uji Asumsi klasik, maka dilakukan uji hipotesis. Terdapat tiga pengujian yang harus dilakukan dalam uji hipotesis pada riset ini yakni: uji f, uji t, serta koefisien determinasi.

Pada uji t ($\alpha = 0,05$), LOG(PAD) berkoefisien -0,614852 dengan Prob. 0,2179 sehingga pengaruhnya negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Utara. IPM berkoefisien 3,615931 dengan Prob. 0,0000 sehingga berpengaruh positif dan signifikan. Kemiskinan (LOG(KM)) berkoefisien -19,29937 dengan Prob. 0,0000 sehingga berpengaruh negatif dan signifikan. Pengangguran (LOG(PG)) berkoefisien -0,963516 dengan Prob. 0,0257 sehingga berpengaruh negatif dan signifikan.

Tabel 4. 6 Hasil Estimasi Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.86969	21.75451	0.729490	0.4670
LOG(PAD)	-0.614852	0.496563	-1.238215	0.2179
IPM	3.615931	0.564499	6.405561	0.0000
LOG(KM)	-19.29937	4.145347	-4.655670	0.0000
LOG(PG)	-0.963516	0.426943	-2.256780	0.0257

Sumber : Data diolah menggunakan E-views 12

Uji F

Berdasarkan Nilai Prob(F-statistic) = 0,012998 (< 0,05), sehingga secara bersama-sama variabel PAD, IPM, kemiskinan, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan model layak secara statistik.

Tabel 4. 7 Hasil Estimasi Uji F

R-squared	0.328896	Mean dependent var	3.328848
Adjusted R-squared	0.140149	S.D. dependent var	2.039425
S.E. of regression	1.891122	Akaike info criterion	4.306787
Sum squared resid	457.7716	Schwarz criterion	5.003272
Log likelihood	-318.3099	Hannan-Quinn criter.	4.589514
F-statistic	1.742517	Durbin-Watson stat	2.655410
Prob(F-statistic)	0.012998		

Sumber : Data diolah menggunakan E-views 12

Koefisien Determinasi

Sementara itu, Nilai R-squared = 0,328896 berarti sekitar 32,88% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, sedangkan 67,12% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti investasi (PMTB), kualitas infrastruktur, struktur sektor ekonomi, belanja modal, iklim usaha, dan kualitas institusi daerah.

Tabel 4. 7 Hasil Estimasi Uji R Square

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.86969	21.75451	0.729490	0.4670
LOG(PAD)	-0.614852	0.496563	-1.238215	0.2179
IPM	3.615931	0.564499	6.405561	0.0000
LOG(KM)	-19.29937	4.145347	-4.655670	0.0000
LOG(PG)	-0.963516	0.426943	-2.256780	0.0257

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.328896	Mean dependent var	3.328848
Adjusted R-squared	0.140149	S.D. dependent var	2.039425
S.E. of regression	1.891122	Akaike info criterion	4.306787

Sumber : Data diolah menggunakan E-views 12

Kalkulasi yang diterapkan dalam kajian ini mengaplikasikan metodologi FEM guna mengamati dampak pendapatan asli daerah, IPM, kemiskinan, dan jumlah pengangguran. Hasil output estimasi Pool FEM berikut:

Tabel 1.
Hasil Estimasi Pooled Data

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.86969	21.75451	0.729490	0.4670
LOG(PAD?)	-0.614852	0.496563	-1.238215	0.2179
IPM?	3.615931	0.564499	6.405561	0.0000
LOG(KM?)	-19.29937	4.145347	-4.655670	0.0000
LOG(PG?)	-0.963516	0.426943	-2.256780	0.0257

Sumber : Data diolah menggunakan E-views 12

Berdasarkan pengolahan data persamaan pertumbuhan ekoomi di Provinsi Sumatera Utara seperti berikut:

$$PE = 15,86969 - 0,614852 \log(PAD) + 3,615931$$

$$IPM - 19,29937 \log(KM) - 0,963516 \log(PG)$$

1. Koefisien LOG(PAD) negatif namun tidak signifikan (Prob. 0,2179). Secara arah, peningkatan PAD tidak otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jika dihitung semi-elastisitas, kenaikan PAD 1% hanya berkaitan dengan penurunan PE sekitar 0,0061 poin persentase ($-0,614852 \times 0,01$), dan hubungan ini tidak cukup kuat secara statistic. hasil ini mengarah pada dugaan bahwa persoalannya bukan semata pada “besar-kecilnya PAD”, tetapi pada efektivitas pemanfaatan PAD—misalnya komposisi belanja yang masih dominan belanja rutin, kualitas belanja publik yang belum produktif, atau efek belanja yang membutuhkan waktu untuk terlihat. Pada periode 2019–2023 (krisis–pemulihan), banyak daerah juga memprioritaskan belanja responsif sehingga dampaknya pada output produktif bisa tidak langsung muncul.
2. Koefisien IPM sebesar 3,615931 (Prob. 0,0000) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia berasosiasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya, kenaikan IPM 1 poin berkaitan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi sekitar 3,62 poin persentase, ceteris paribus. temuan ini menegaskan bahwa perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak berperan sebagai kanal peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, serta kapasitas inovasi daerah. Dalam perspektif kebijakan, penguatan layanan dasar dan investasi SDM merupakan strategi yang konsisten untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih berkelanjutan.
3. Koefisien LOG(Kemiskinan) sebesar $-19,29937$ (Prob. 0,0000) menegaskan

bahwa kemiskinan merupakan faktor penghambat pertumbuhan. Dengan interpretasi semi-elastisitas, kenaikan kemiskinan 1% berkaitan dengan penurunan PE sekitar 0,193 poin persentase ($-19,29937 \times 0,01$), ceteris paribus.

4. kemiskinan menekan pertumbuhan melalui pelemahan daya beli, rendahnya produktivitas, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan/kesehatan yang pada akhirnya menurunkan kualitas tenaga kerja. Dalam fase pascapandemi, kerentanan rumah tangga dan ketidakmerataan pemulihan antarwilayah dapat memperkuat hubungan negatif ini. Oleh karena itu, kebijakan pengurangan kemiskinan perlu diposisikan sebagai strategi pemulihan ekonomi, bukan sekadar agenda sosial.
5. Koefisien LOG(Pengangguran) sebesar $-0,963516$ (Prob. 0,0257) menunjukkan pengangguran menghambat pertumbuhan. Secara semi-elastisitas, kenaikan pengangguran 1% berkaitan dengan penurunan PE sekitar 0,0096 poin persentase ($-0,963516 \times 0,01$). meningkatnya pengangguran menurunkan kapasitas produksi, mengurangi pendapatan rumah tangga, dan melemahkan konsumsi. Dalam konteks pemulihan 2019–2023, penciptaan kerja produktif dan peningkatan kualitas matching tenaga kerja menjadi kunci agar pertumbuhan tidak “rapuh” dan lebih inklusif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa faktor sosial khususnya peningkatan IPM serta penurunan kemiskinan dan pengangguran lebih konsisten terkait dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Utara dibandingkan peningkatan PAD semata. Ini mengindikasikan perlunya penguatan tata kelola fiskal daerah agar PAD benar-benar diterjemahkan menjadi belanja publik yang produktif, sekaligus memperkuat intervensi pembangunan manusia dan perlindungan sosial sebagai strategi pertumbuhan yang inklusif.

CONCLUSION AND SUGGESTION (PENUTUP)

Intisari riset ini ialah Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2019–2023, sehingga peningkatan PAD belum otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, IPM terbukti berpengaruh positif dan signifikan, yang menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan dan pengangguran masing-masing

berpengaruh negatif dan signifikan, yang berarti peningkatan kedua variabel tersebut akan menekan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berlandaskan perolehan riset yang telah dilaksanakan serta simpulan yang didapat, maka penyusun memaparkan sejumlah anjuran yaitu Pemerintah daerah tidak hanya perlu meningkatkan PAD, tetapi juga mengarahkan alokasinya pada belanja produktif seperti infrastruktur ekonomi dan penguatan UMKM agar memiliki efek pengganda terhadap pertumbuhan. Karena IPM terbukti dominan, kebijakan pembangunan sebaiknya difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Pengurangan kemiskinan perlu diposisikan sebagai strategi ekonomi melalui pemberdayaan dan perluasan akses pembiayaan produktif. Selain itu, penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor unggulan daerah menjadi prioritas untuk menekan pengangguran dan meningkatkan output ekonomi.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambahkan variabel seperti investasi, belanja modal, infrastruktur, dan kualitas institusi serta menggunakan periode penelitian yang lebih panjang agar hasil estimasi lebih robust dan mampu meningkatkan daya jelas model (R^2).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- [2] Aderma, E. et al. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pendidikan* 7(3). Medan.
- [3] Ahya, R. (2021). Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Fiskal. *Jurnal Ekonomi Daerah* 8(2): 45–58.
- [4] Arsyad, L. (2017). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi 5). UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- [5] Aswanto & Edward. (2025). Analisis tingkat pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Publication details not provided).
- [6] Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Sumatera Utara Dalam Angka 2019*. BPS Provinsi Sumatera Utara. Medan.
- [7] Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara 2019*. BPS Provinsi Sumatera Utara. Medan.
- [8] Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara 2020*. BPS Provinsi Sumatera Utara. Medan.
- [9] Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara 2021*. BPS Provinsi Sumatera Utara. Medan.
- [10] Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara 2022*. BPS Provinsi Sumatera Utara. Medan.
- [11] Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2023*. BPS RI. Jakarta.
- [12] Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Berita Resmi Statistik: Inflasi Januari–Maret 2025*. BPS RI. Jakarta. Available at: <https://www.bps.go.id> [Accessed 20 August 2025].
- [13] Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. Bank Indonesia. Jakarta. Available at: <https://www.bi.go.id> [Accessed 20 August 2025].
- [14] Becker, G.S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education* (3rd ed.). University of Chicago Press. Chicago.
- [15] Damanik, M. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ekonomi Regional* 5(2): 101–113.
- [16] Darnawaty & Purnamasari, N. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, dan Pendidikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Daerah* 4(1): 55–66.
- [17] Daulay, M. (2020). Pendapatan Asli Daerah Sebagai Penopang Pembangunan. *Jurnal Ilmu Ekonomi* 12(1): 77–89.
- [18] Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- [19] Nasution, A.K. (2022). Analisis Pengaruh PDRB, IPM, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2010–2020. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 9(2): 88–103.
- [20] Laodini, A., Rorong, I.P.F., & Tumangkeng, S.Y.L. (2023). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana transfer, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara periode 2010–2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.

- [21] Lincoln, A. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Pertumbuhan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [22] Lucas, R.E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics* 22(1): 3–42.